

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Indonesian Foreign Policy towards Palestine after the Recognition of Jerusalem as the Capital of Israel

Ella Susila Wati^{a,1}, Ibnu Burdah^{b,2}

^{a,b}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adi Sutjipto, Yogyakarta 55281, Indonesia
ellasilawati240@gmail.com¹, ibnuburdah@yahoo.com²

ABSTRAK

Artikel ini membahas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Palestina adalah satu-satunya negara anggota Konferensi Asia Afrika yang belum mencapai kemerdekaan. Konflik Palestina dan Israel telah terjadi dari setengah abad lalu dan hingga sekarang belum merdeka. Konflik ini, kemudian meletus pada tahun 2017. Dimana Donald Trump seseorang presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data berupa artikel jurnal dan tulisan lainnya yang mendukung penelitian ini. Sehingga penulis menemukan beberapa tentang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina: pertama, terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap krisis Palestina tidak dapat diabaikan. Kedua, diplomasi multilateral, dimana Indonesia aktif dalam KTT luar biasa OKI di Turki, pada forum MU PBB dan lembaga Dewan Keamanan PBB pada informasi Yerusalem. Ketiga, kebijakan Pembebasan Bea Pajak Produk dari Palestina. Terakhir, yaitu dukungan kemanusiaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci : Kebijakan luar negeri Indonesia, Palestina, Yerusalem

ABSTRACT

The article discusses Indonesia's foreign policy on Palestine after Jerusalem's recognition as the capital of Israel. Palestine is the only member of the Asian-African Conference that has not yet reached independence. Palestinian and Israeli conflicts have occurred from half a century ago and until now it has not been independent. This conflict, then erupted in 2017. Where Donald Trump a president of the United States announced that Jerusalem was the capital of Israel. What is Indonesia's foreign policy towards Palestine after the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. Research with qualitative research types. The data collection methods in the form of journal articles and other writings that support this research. So the authors found several about Indonesia's foreign policy towards Palestine: first, there were external and internal factors that influenced Indonesia's policy on the could not be ignored. Second, multilateral diplomacy, where Indonesia is active in the extraordinary summit of OKI in Turkey, at the UN MU forum and the UN Security Council in Jerusalem's information. Third, the product tax exemption policy from Palestine. Finally, namely humanitarian support in the fields of education and health.

Keywords : Foreign Policy Indonesia, Palestine, Jerusalem

Info Artikel :

Disubmit: 10 November 2023

Direview: 10 Desember 2023

Diterima : 05 Januari 2024

Copyright © 2024- PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam kancah politik global yang semakin kompleks, kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas regional dan mengadvokasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Salah satu isu yang secara mendalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia adalah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Palestina adalah satu-satunya negara yang

berpartisipasi dalam Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang masih belum memiliki kemerdekaan. Pendudukan Israel atas Palestina terus berlanjut, dan banyak bentuk pelanggaran terhadap warga sipil Palestina. Upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari berbagai macam negara tetap berlangsung. Hingga saat ini ada 193 negara yang mengakui Palestina. Ketika Palestina mengumumkan kemerdekaan pada 15 November 1988, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara tersebut. Pada saat yang sama dengan “komunike bersama dengan pembukaan Hubungan Diplomatik” yang diumumkan antara Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan pemimpin Palestina Farouq Kaddoumi pada 19 Oktober 1989, sekaligus dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina ditandai dengan pembukaan kedutaan besar di Jakarta.

Pada tanggal 23 April 1990, duta besar Palestina pertama untuk Indonesia menyampaikan pesan-pesan kepercayaan kepada presiden Soeharto. Di sisi lain, pemerintah Republik Islam Iran telah memutuskan bahwa kedutaan utama Republik Iran di Tunis juga diakreditasi ke negara Palestina, akreditasi Palestina telah tunduk pada KBBRI Yordania sejak 1 Juni 2004. Namun, sebagian besar negara Veto, termasuk Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris, belum mengakui pengakuan kedaulatan penuh Palestina. Hal ini karena Amerika Serikat mempunyai kepentingan dengan Israel. Sementara itu, pada 29 November 2012, selama Forum Multilateral, Palestina secara resmi diterima sebagai negara Observer non-member PBB melalui Resolusi Majelis umum PBB No. 67/19, dengan Indonesia bertindak sebagai co-Sponsor Resolusi. Ini memiliki signifikansi simbolis dan strategis bagi Palestina, karena mengkonsolidasikan pengakuan internasional atas negara Palestina dan membuka pintu bagi partisipasi Palestina dalam lembaga PBB dan pemilihan.

Pada 30 September 2015, dengan dukungan mayoritas anggota PBB, bendera Palestina secara resmi berkibar di Markaz besar PBB di New York. Pada Mei 2018, Palestina adalah anggota *Organisation for the Prohibition Of Chemical Weapon* (OPCW), setelah bergabung pada tahun 2017 dan UNESCO pada tahun 2011. Dunia Internasional telah mendorong resolusi damai antara Palestina dan Israel yang sesuai berdasarkan pada prinsip “two-state-solution” untuk beberapa waktu, yang telah diminta dalam sejumlah resolusi yang disetujui oleh majelis umum PBB dan Dewan Keamanan. Indonesia merupakan bagian anggota yang setuju terhadap resolusi pada saat sidang majelis umum PBB terlaksana. Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia siap berperan terhadap isu kemanusiaan serta bersikap untuk menciptakan perdamaian dunia (Mersudi, 2018). Namun, ada banyak tantangan di antara keduanya. Israel terus mencoba untuk mengkolonisasi wilayah Palestina dengan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina untuk membuka jalan bagi ekspansi pemukiman di Tepi Barat. Pasukan Israel dilaporkan telah membunuh 27 gadis kecil Palestina di Tepi Barat, termasuk di kota suci Al-Quds Timur Dari tahun 2000. Selama tahun 2022, pasukan Israel dan imigran ilegal “Yahudi” di Tepi Barat membunuh 53 jiwa anak-anak Palestina, termasuk 36 anak yang diculik dan dibunuh di Gaza. Ditambah 250 lebih warga sipil Palestina lainnya yang memilih melawan pemerintah dan ingin berjuang untuk kemerdekaan negara mereka namun, mereka yang secara terbuka melanggar hukum hak asasi manusia internasional dibunuh oleh Israel (Gaza Media, 2022) . perilaku seperti itu adalah ilegal dan bertentangan dengan Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016.

Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. Keputusan tersebut memicu gelombang reaksi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat telah mengguncangkan tatanan politik dan keamanan global, membawa pergeseran dalam dinamika diplomasi regional dan internasional. Konflik antara Palestina dan Israel atas Yerusalem telah meningkat secara dramatis. Hal ini dihadapkan dengan kemarahan oleh banyak negara yang secara terbuka menyatakan dukungan untuk Palestina terutama Indonesia. Indonesia, yang telah lama menjadi pendukung Palestina dalam konflik berkepanjangan dengan Israel. Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang konsisten dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan pencapaian solusi dua negara. Indonesia mendukung solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam

perdamaian dan keamanan. Indonesia, dengan populasinya yang lebih banyak didominasi muslim, sangat penting untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Bahkan Setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Indonesia mempertahankan sikap pro-Palestina dalam kebijakan Luar negerinya.

Kebijakan internasional adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk mengekspresikan kepentingan nasional di luar negeri dalam suatu negara dalam konteks tertentu. Korelasi Indonesia-Palestina muncul ketika Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara muslim dan mulai menerapkan kebijakan liberal yang “aktif” dalam arti bebas tidak berpihak pada blok mana pun dan memilih caranya sendiri untuk menghadapi masalah internasional. Hasil positif akan menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif dalam memecahkan masalah yang timbul di dunia internasional. Indonesia juga telah mengikuti berbagai forum internasional untuk mempromosikan perdamaian dan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina

Indonesia, sebagai pemimpin KAA, secara konsisten menunjukkan kebebasan Palestina. Sebagai negara muslim, Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Palestina sebagai bagian dari upaya diplomatik pemerintah untuk memperkuat hubungan antar negara anggota Organisasi Kerjasama Islam di kota suci Yerusalem. Kebijakan resmi pemerintah Indonesia telah dibentuk oleh konflik yang sedang berlangsung antara Palestina dan Isarel. Maka dengan adanya pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel membuat Indonesia merespon konflik tersebut. Sehingga disini penulis akan mendiskusikan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara adalah sintesis dan refleksi dari kondisi domestik yang dipengaruhi oleh peristiwa global. Politik luar negeri juga di definisikan sebagai serangkaian kebijakan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Politik luar negeri, dalam arti yang paling luas, adalah penerapan nilai-nilai, sikap, dan tujuan suatu negara dalam urusan internasional untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional di luar negeri. masyarakat umum cenderung melihat politik di panggung internasional sebagai perpanjangan dari politik domestik. Akibatnya, politik luar negeri suatu negara bukanlah urusan tunggal, melainkan interaksi antara kepentingan domestik dan internasional. Tujuannya untuk melindungi kepentingan nasional, mempromosikan keamanan, meningkatkan kerjasama ekonomi, memajukan tujuan politik, dan menjalankan diplomasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks hubungan antarnegara (Ganewaati Wuryandari, 2011).

Untuk memahami konsep politik luar negeri terbagi ke dalam dua komponen yaitu: politik dan luar negeri. politik atau sering disebut dengan bahasa Inggris (*policy*) adalah proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan tindakan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam rangka mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat serta mengelola sumber daya dan kekuasaan. Ini melibatkan distribusi kekuasaan, pengambilan keputusan, pengaturan norma dan aturan, serta interaksi antara berbagai entitas dalam suatu sistem. Sedangkan konsep luar negeri (*foreign*) merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hubungan, kebijakan, dan interaksi suatu negara dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Ini termasuk diplomasi, perdagangan, kerjasama, keamanan, partisipasi dalam organisasi internasional, serta upaya mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional di dunia global. Jadi, politik luar negeri adalah bagian dari politik yang fokus pada aspek hubungan dan kebijakan suatu negara dengan negara-negara lain di luar batas wilayahnya.

Tujuan dari politik luar negeri adalah hasil dari proses penetapan tujuan nasional. Tujuan-tujuan ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari masa lalu dan aspirasi untuk masa depan. Salah satu definisi dari tujuan politik luar negeri adalah untuk memberikan wawasan tentang status masa depan suatu negara dengan harapan bahwa pemerintah akan dapat mengurangi pengaruhnya pada negara lain dengan mengubah atau mempertahankan kebijakan mereka sendiri. Tujuan politik luar negeri dapat bersifat spesifik dan umum, tergantung dari segi mana memandangnya. Namun, ketika dilihat melalui cara pandang waktu, tujuan kebijakan luar negeri dapat bertahan dalam waktu tertentu dan dapat secara bersamaan memiliki makna yang berbeda seiring dengan berubahnya waktu. Adapun tujuan umum politik luar negeri yaitu kemandirian nasional, promosi kesejahteraan ekonomi, diplomasi dan hubungan antar negara, promosi nilai dan kepentingan nasional, partisipasi dalam organisasi internasional, penyelesaian konflik dan pencegahan perang, perlindungan dan kesejahteraan warga negara di luar negeri, pengendalian penyebaran senjata nuklir dan perlucutan senjata, penanggulangan masalah global, prestise dan pengaruh internasional.

Demikian dengan politik luar negeri Indonesia bertanggung jawab atas pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan sesuai dengan perubahan dinamika nasional. Politik Luar Negeri Indonesia menyadari, dan berusaha untuk menampung banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ini termasuk pengaruh baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung pada hubungan antar negara dan persepsi Indonesia.

Abad ke-21 telah melihat perubahan yang cepat dan ekspansif di berbagai sektor masyarakat, dengan konsekuensi yang luas untuk politik dan ekonomi internasional. Tanda-tanda perubahan ini telah ada sejak abad ke-19. Tetapi pada akhir tahun 1980-an, tidak ada tanda-tanda muncul bahwa dunia akan mengalami perubahan dan perkembangan yang cepat, mirip dengan apa yang kita lihat di sekitar kita sekarang. Namun, dalam jangka waktu yang relatif singkat yang menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, masyarakat internasional mengalami sejumlah perubahan kebijakan yang sporadis yang memiliki dampak mendalam pada kehidupan orang-orang di seluruh dunia.

B. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah kumpulan tindakan, prinsip, strategi, dan keputusan negara yang dibuat di tingkat internasional untuk mengatur interaksi dan hubungan dengan negara lain. Diplomasi, perdagangan, keamanan, kerjasama internasional, dan keanggotaan dalam organisasi internasional adalah semua komponen kebijakan luar negeri. Tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional suatu negara di dunia internasional serta memengaruhi perkembangan global sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kebijakan luar negeri dianggap sebagai refleksi atau kelanjutan dari kebijakan dan prioritas domestik. Menurut Departemen Luar Negeri RI, “diplomasi total” adalah kunci untuk memastikan implementasi kebijakan luar negeri negara yang efisien.

Menurut George Modelski, kebijakan luar negeri adalah “suatu kegiatan yang dikembangkan atau dilakukan oleh suatu komunitas atau bangsa dengan tujuan mengubah perilaku bangsa-bangsa lain dan sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat internasional. K. J Modelski lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah seperangkat ide atau tindakan yang diambil oleh pembuat keputusan untuk mengatasi masalah internasional dan mempromosikan berbagai perubahan seperti kebijakan baru, tindakan militer, atau inisiatif non-pemerintah lainnya di lingkungan internasional. Setiap negara terlibat dalam Kebijakan luar negeri untuk memajukan kepentingan sendiri, memperoleh prestise dan pengaruh atas negara-negara lain, dan mempertahankan keamanan bersama.

Terdapat tiga teori kebijakan luar negeri yang coba menjelaskan hubungan antara suatu negara dengan peristiwa dan keadaan di luar negaranya, yaitu:

- 1) Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*) merujuk pada pendekatan, pandangan, atau arah umum yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam merancang dan menjalankan kebijakan luar negerinya. Orientasi ini membentuk kerangka kerja berdasarkan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan nasional untuk menangani keadaan eksternal yang membutuhkan pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut.
- 2) Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*) merujuk pada serangkaian prinsip, tujuan, dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur interaksi dan hubungannya dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Ini melibatkan komitmen terhadap tujuan-tujuan nasional dan strategi konkret yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam konteks hubungan internasional. Di sini, Kebijakan luar negeri membuat rencana dan komitmen konkret yang disempurnakan oleh para pembuat keputusan untuk mencapai dan mempertahankan lingkungan eksternal yang selaras dengan prioritas kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak membantu negara untuk mengoordinasikan upaya dan mengarahkan interaksi mereka dengan negara-negara lain sesuai dengan tujuan nasional dan lingkungan internasional yang terus berubah.
- 3) Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) mengacu pada tindakan konkret yang diambil oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Ini melibatkan serangkaian tindakan, keputusan, dan interaksi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam lingkup hubungan internasional. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi mencerminkan cara negara berinteraksi dengan lingkungan internasional dan menjalankan strategi untuk melindungi kepentingan nasional serta mempromosikan tujuan-tujuan tertentu di dunia global. (James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thopson, 1976).

Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi komponen-komponen seperti seperangkat arah, seperangkat komitmen dan rencana tindakan. Setiap negara menghubungkan dalam negeri dengan peristiwa dan keadaan di luar melalui tiga jenis kebijakan luar negeri yang dijelaskan secara singkat di atas.

Aspek-aspek tertentu dari politik internasional dan kebijakan luar negeri, seperti orientasi kebijakan hukum asing mengenai hak suara pada skala nasional dan global, dapat berdampak pada politik domestik dan umum dapat berlaku dalam kaitannya dengan kondisi politik. Bagian penting dari pembuatan kebijakan luar negeri adalah berusaha dengan masalah sehari-hari yang muncul baik di dalam maupun di luar suatu negara. Diplomat dan pejabat luar negeri sering berurusan dengan masalah yang dimiliki ruang lingkup sempit dan langsung. Namun, sebagian besar pemerintah juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun berbagai tindakan yang mencerminkan kebutuhan dan sasaran. Misalnya, tujuannya terkait dengan beberapa isu seperti mengusulkan perdamaian bagi konflik Arab-Israel, atau masalah umum seperti pembentukan pasar bersama di wilayah tertentu (K. J. Holsti, 1983).

Dalam teori kebijakan luar negeri menurut Holsti, ada tiga rumus keberadaan suatu negara untuk membentuk atau menjalankan kebijakan luar negeri, diantaranya:

- a. Kemanusiaan dan etika global. Negara dapat membentuk kebijakan luar negeri berdasarkan pertimbangan moral dan etika, dengan tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan hak asasi manusia di tingkat internasional. Nilai, dalam tujuan suatu negara merupakan salah satu faktor yang mendorong pembuatan kebijakan luar negeri dibangun dan mencapai tujuan suatu negara. hal ini karena, kebijakan luar negeri dikonseptualisasikan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan suatu negara. Nilai-nilai “inti” suatu negara

dapat dipertahankan sejauh mana jika pembuat kebijakan memiliki pandangan dunia yang benar. Beberapa pemerintah menempatkan nilai tinggi pada mengendalikan atau melindungi wilayah yang dipertanyakan, baik karena penduduknya dilihat sebagai ancaman terhadap integritas teritorial negara mereka atau karena mereka memiliki akses ke sumber daya domestik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi negara.

- b. Keamanan Nasional dan Kedaulatan. Keamanan nasional menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negeri, di mana negara berupaya melindungi wilayahnya, sumber daya, dan kedaulatan dari ancaman militer atau non militer yang datang dari luar.
- c. Kesejahteraan Ekonomi dan keseimbangan keuntungan, negara mengambil kebijakan luar negeri dengan tujuan memperluas kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional serta memastikan keseimbangan keuntungan dalam interaksi dengan negara-negara lain. Dalam menentukan apakah atau tidak untuk menerapkan kebijakan luar negeri, sebuah negara mempertimbangkan kekhawatiran keamanan nasional baik pada tahap perencanaan dan implementasi. Komponen kebijakan luar termasuk pengetahuan tentang praktik dan perspektif negara-negara lain, serta membuat keputusan dan mengambil tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang tepat (K. J. Holsti, 1983).

Setiap negara memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda di berbagai bidang, dari ekonomi dan keamanan hingga elit politik. Setiap negara bebas untuk membentuk sistem hukumnya sesuai dengan tujuan dan nilai-nilainya sendiri, tetapi mereka semua diminta untuk menghormati hukum internasional. Mengakui kepentingan negara-negara lain yang harus dipertimbangkan sehingga campur tangan berbahaya dihindari dan perdamaian dan keamanan tidak terancam (Rachmaniyah, 2014).

Implementasi kebijakan luar negeri dapat terjadi dalam tiga cara: melalui tindakan militer, kerjasama ekonomi, dan ekspansi wilayah. Holsti berpendapat bahwa pertimbangan domestik dan internasional harus dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan luar negeri. Semua fenomena dan kondisi internasional yang mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk membuat keputusan politik tentang bagaimana menanggapi kondisi tersebut dimasukkan sebagai faktor eksternal dalam definisi ini. Faktor internal didalamnya meliputi pemerintahan dan filsafat (K. J. Holsti). Sebuah hukum ekstranasional dan kekuasaan badan legislatif, atau rezim, di negara tertentu. Kebijakan luar negeri Indonesia membantu menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.

Oleh karena itu, kebijakan ini ditentukan oleh kebutuhan nasional sebagai salah satu dasar untuk membuat keputusan di bawah hukum internasional. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk memahami cara terbaik untuk memenuhi kepentingan nasional, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, selain memajukan tujuan negara yang dinyatakan dan mempertahankan citra bangsa di luar negeri. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya untuk mempertimbangkan pertimbangan moral dan hukum saat merumuskan kebijakan terhadap negara-negara di luar wilayahnya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan *library research*. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena dengan menganalisis data non-angka. Adapun sumber data untuk penelitian ini yaitu dokumen dan arsip, mengumpulkan data dari dokumen, catatan, laporan atau materi tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dalam penelitian terdiri dari dua yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer data utama berupa portal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta buku politik internasional yang ditulis oleh K.J.Holsti dan M. Tahir Azhary dan data sekunder data pendukung berupa buku, artikel, dan referensi lainnya. Analisis data dalam penelitian ini, Pertama, pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang beragam dan relevan. Kedua, pengelompokan data yang kemudian di analisis. Ketiga, setelah data di analisis maka penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia harus berhati-hati dalam mempertahankan konsistensi dalam menyelesaikan konflik palestina-Israel jika ingin memberikan gambaran yang akurat tentang situasi di Palestina. Pemikiran yang dimaksudkan tidak didasarkan prinsip-prinsip agama, tetapi pada unsur-unsur yang paling penting dari konstitusi manusia dan sumber-sumber moralitas manusia. Pada artikel ini, penulis akan terlebih dahulu menyebutkan faktor-faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri menggunakan konsep Holsti, dan politik luar negeri Indonesia Pasca diakuinya yerusalem sebagai ibukota Israel. Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik.

A. Faktor Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia terhadap masalah Palestina tidak didorong oleh bias agama tetapi oleh prinsip martabat dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, prinsip ini dipertimbangkan ketika merencanakan pengambilan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan Republik Indonesia. Sejarah, harmoni agama, dan konsensus politik semua memainkan peran dalam pembentukan konsensi ini. Indonesia telah meminta komunitas internasional untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebagai bentuk jaminan bagi Indonesia dalam konferensi Asia Afrika dan untuk menghentikan agresi Israel terhadap Palestina karena hubungan bersejarah yang ada di antara kedua negara. Bukti bersejarah menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Palestina telah menguntungkan kedua negara dengan membentuk ikatan emosional yang kuat yang mempengaruhi opini publik dan pengambilan kebijakan pada masalah Palestina.

Faktor internal dan eksternal memengaruhi kebijakan luar negeri menurut K.J Holsti. Semua fenomena dan kondisi internasional yang membentuk keputusan politik suatu negara sehubungan dengan strateginya untuk memenuhi tantangan ini disimpulkan dalam istilah “faktor eksternal”. Faktor internal terdiri dari pemerintahan dan Agama (K. J Holsti, 1992). Kelemahan dalam konstitusi nasional dan badan pembuat keputusan atau sistem pengambilan keputusan sistem itu yang lemah mempengaruhi semua keputusan kebijakan luar negeri. Jelas bahwa pola pikir Indonesia yang diadopsi dalam melindungi stabilitas dan perdamaian global tertanam dalam UUD 45, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, kepentingan nasional diperhitungkan ketika membuat keputusan tentang kebijakan luar negeri, itulah sebabnya kebijakan Amerika Serikat begitu jelas bias terhadap Indonesia. Kepentingan nasional negara yang jauh dapat menginformasikan desain kebijakan luar negeri, seperti kebijakan eksternal Indonesia.

Setiap negara harus mematuhi prinsip kepentingan nasional saat merumuskan kebijakan terhadap negara-negara lain. Faktor ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang berperan dalam pembentukan keputusan kebijakan luar negeri, yang mewakili harapan rakyat Indonesia bahwa pemerintah mereka akan memainkan peran aktif dalam menyelesaikan konflik di Palestina. Di sini, karena Indonesia adalah negara yang sebagian besar muslim, ada solidaritas emosional dengan warga Palestina yang menjadi korban konflik Palestina Israel. Di mana organisasi mayoritas muslim mengambil tindakan dalam upaya untuk meyakinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengakhiri konflik di Palestina. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rasa solidaritas yang kuat dengan rakyat Palestina

Kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk keadaan politik internasional yang memaksa negara itu membuat pilihan yang sulit untuk menghindari hasil yang berpotensi bencana. Pemerintah Indonesia tidak dapat tetap netral selama ketegangan antara Palestina dan Israel berlangsung di kota suci Yerusalem.

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri negara yang relatif lemah terhadap negara lain dapat secara signifikan dipengaruhi oleh struktur sistem internasional (M. Tahir Azhary, 1983). Situasi politik menjadi mengejutkan ketika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Sebagai superkekuatan terkemuka di dunia, Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya untuk menyakinkan komunitas internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada bulan Agustus 1929, kekerasan meletus di pinggiran barat Tembok Ratapan. Konflik antara Palestina dan Israel tentang masalah Yerusalem terus berlanjut hingga saat ini. Sementara pemerintah di seluruh dunia terus berdebat tentang Yerusalem, pihak Israel cenderung untuk mengambil sikap unilateral. Pada tahun 1948, Israel membangun gedung Mahkamah Agung di Yerusalem dan tahun berikutnya presiden Israel dilantik di kota tersebut.

Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Amerika Serikat memindahkan kantor pemerintahnya ke Yerusalem. Orang-orang Palestina yang terkena dampak langsung membutuhkan dukungan dari semua negara. Ini mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk bertindak menanggapi keputusan Amerika Serikat. Konflik di Yerusalem telah mempengaruhi harmoni antar agama serta keseimbangan kekuasaan.

Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, namun pengakuan ini melanggar hukum internasional. Kementerian luar negeri Indonesia juga mengeluarkan pernyataan resmi mengecam pengakuan tersebut dan menekankan pentingnya pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Dari faktor-faktor ini, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa faktor yang dijelaskan memiliki efek pada kebijakan luar negeri Indonesia. Menanggapi tantangan internasional dan memperkuat kebanggaan nasional di komunitas internasional.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia:

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional, seperti keamanan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, menjadi faktor utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia harus selaras dengan upaya menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Keamanan nasional merupakan faktor kunci dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Indonesia berusaha untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya dari ancaman atau konflik dengan negara lain. Ini termasuk upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan regional. Kemudian stabilitas ekonomi adalah faktor penting dalam kebijakan luar negeri. Indonesia mencari peluang untuk membuka pasar ekspor, menarik investasi asing, dan menjaga akses terhadap sumber daya ekonomi yang penting seperti energi dan komoditas.

2. Nilai-nilai dan Identitas

Faktor budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia memainkan peran penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dukungan terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sering kali didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Indonesia memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara negara ini merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negerinya. Pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan nilai-nilai dan identitas yaitu: Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini yang menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Selanjutnya Keragaman dan Pluralisme, Indonesia adalah Negara yang sangat

beragam, baik dari segi budaya, agama, dan etnis. Nilai-nilai pluralism dan toleransi terhadap perbedaan adalah bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Ini memengaruhi pandangan Indonesia terhadap konflik agama dan etnis di tingkat internasional, di mana Indonesia seringkali mendukung dialog damai dan toleransi. Nilai-nilai dan identitas nasional Indonesia berperan penting dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia seringkali mencerminkan prinsip-prinsip dan tujuan yang didasarkan pada nilai-nilai ini, dan negara ini berusaha untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kerja sama di tingkat internasional.

3. Hubungan Bilateral dan Multilateral

Indonesia memiliki hubungan banyak negara dan organisasi internasional. Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dinamika hubungan bilateral dan multilateral, serta kemitraan yang dibangun dengan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional.

4. Ketahanan dan keamanan

Ketahanan merujuk pada kemampuan suatu Negara atau masyarakat untuk bertahan dan pulih dari berbagai jenis ancaman dan tekanan. Keamanan mengacu pada upaya perlindungan terhadap integritas wilayah, kedaulatan, serta keselamatan dan keamanan nasional suatu Negara. Keamanan nasional dan ancaman dari negara-negara atau kelompok-kelompok tertentu dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Keamanan regional dan global juga menjadi perhatian penting. Faktor keamanan regional dan global memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri. Ancaman seperti konflik bersenjata, terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas mempengaruhi bagaimana Indonesia merespons dan berinteraksi dengan negara-negara lain.

5. Keterkaitan Ekonomi

Faktor ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi, memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri. Hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu dapat memengaruhi kebijakan terkait. Aspek ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi, turut memainkan peran dalam kebijakan luar negeri. Kesempatan ekonomi dan potensi kerjasama di pasar internasional mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Kerja sama ekonomi Negara sering terlibat dalam kerja sama ekonomi regional perdagangan bebas atau integrasi ekonomi. Sehingga hubungan dagang dengan Negara-negara lain memainkan peran penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan perdagangan, tariff dan hambatan perdagangan dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan strategis antara Negara-negara. Kemudian investasi asing baik yang masuk maupun keluar dari suatu Negara, dapat memengaruhi kebijakan luar negeri. Negara sering berusaha untuk menarik investasi asing dan menjaga iklim investasi yang stabil.

6. Opini Publik

Opini publik dan dukungan dari masyarakat juga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan aspirasi dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu internasional. Kebijakan luar negeri pada opini publik meliputi media massa, pendapat umum, dan pemilihan umum. Media massa berupa berita dan liputan memiliki dampak besar terhadap opini publik. Cara media melaporkan peristiwa dan isu-isu luar negeri dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang kebijakan luar negeri. Pendapat umum merupakan opini publik yang secara luas diterima dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Pemimpin politik sering memperhitungkan apa yang masyarakat inginkan dalam kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri kadang-kadang menjadi isu dalam pemilihan umum. Pemilih sering memilih pemimpin yang memiliki pandangan luar negeri yang sesuai dengan nilai dan kepentingan nasional mereka.

7. Perkembangan Regional dan Global

Dinamika regional dan global, termasuk perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan di berbagai belahan dunia, memainkan peran dalam membentuk pandangan dan tindakan Indonesia terhadap berbagai isu luar negeri.

8. Keterbatasan Sumber Daya

Faktor ini dapat membatasi kemampuan negara dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan luar negeri dengan efektif. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat membatasi jangkauan dan intensitas interaksi luar negeri. Kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri dalam konteks keterbatasan sumber daya: prioritas kebijakan, keterbatasan sumber daya akan memaksa Negara untuk memprioritaskan isu-isu luar negeri yang paling penting dan strategis. Keterbatasan pada aliansi dan kemitraan yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam hal memilih dan memelihara aliansi dan kemitraan. Negara cenderung mencari kemitraan yang dapat memberikan dukungan sumber daya tambahan atau bantuan keuangan.

Semua faktor ini bersifat saling terkait dan sering kali berubah seiring perubahan kondisi global dan nasional. Proses pengambilan kebijakan luar negeri yang efektif memerlukan analisis yang mendalam, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta kesadaran akan kompleksitas dinamika internasional.

B. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar kuat dalam prinsip-prinsip diplomasi, perdamaian, dan keadilan internasional. Indonesia secara konsisten telah mendukung kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina, serta berupaya untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina melalui jalur diplomasi dua negara. Mendukung Palestina bukan hanya tentang agama, tetapi juga mendukung tentang kemerdekaan Palestina bukan hanya untuk kepentingan Indonesia. Semua bangsa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan nilai kemanusiaan dan moral dengan memenuhi kewajiban ini.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap perjuangan hak-hak Palestina. Indonesia telah menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan rakyat Palestina melalui Menteri luar negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri telah berbicara melawan agresi Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina di forum regional dan internasional. Selanjutnya, pernyataan untuk kemerdekaan Palestina juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada saat pertemuan Menteri Luar Negeri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. Retno menyampaikan bahwa demokrasi harus dihormati dan diaktualisasikan secara optimal dalam tatanan internasional. (Adettia Gama, 2023). Hadirnya dukungan Indonesia terhadap Palestina menggambarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang fokus terhadap isu-isu kemanusiaan (Rezki Satris, 2019). Beberapa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina sebagai berikut:

1) Diplomasi Multilateral

Perkembangan dalam kebijakan luar negeri adalah bagian integral dari menjadi anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional, dan itu harus diperlakukan sebagai demikian, bukan terpisah dari kemajuan domestik. Menurut konsep Trisakti kepemimpinan politik, kemerdekaan politik, dan otonomi budaya, kebijakan politik luar negeri dibahas bersama dengan isu pertahanan dan keamanan. Ketika ditempatkan bersebelahan, dua objek pertama dalam perbandingan elemental memiliki dimensi yang sama. Ia berharap bahwa masa depan, tokoh-tokoh politik asing akan dapat memfasilitasi realisasi visi ekonomi dan budaya melalui kerjasama Internasional dan diplomasi.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dari dorongan terhadap aktifnya Indonesia berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan

Non Blok (GNB), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang melahirkan KTT luarbiasa pada tahun 2016 untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mengutuk tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia di wilayah Palestina. Pemerintahan Indonesia dukungan internasional untuk perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Negara ini berusaha untuk memperoleh dukungan internasional yang lebih luas untuk upaya perdamaian dan solusi berkelanjutan bagi konflik Israel dan Palestina.

Pergeseran politik pada skala lokal, nasional, dan internasional, seperti peyebaran terorisme, Arab Spring, eskalasi konflik Israel dan Palestina, serta peristiwa lain, telah mendorong inisiatif baru yang konstruktif dan berguna untuk kepentingan nasional. Peristiwa akhir 2017, ketika Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menyebabkan kemarahan luas di seluruh dunia. Namun, pada tanggal 7 Desember 2019, Joseph Donovan sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, di bawah arahan presiden Joko Widodo untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan Yerusalem (Muhammad Faqih Hamdani, 2019). Pada tanggal 13 Desember 2017, Menteri luar negeri Indonesia Retno dan delegasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi mengunjungi markas besar KLB di Istanbul, Turki. Pertemuan ini menyoroti enam poin mengenai kebijakan Indonesia, diantaranya (https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina diakses pada 15 Desember 2022):

- a. OKI harus secara tegas memberi penolakan unilateral terhadap Amerika Serikat. Dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, *Two State Solution* adalah solusi satu-satunya pilihan yang layak.
- b. Tidak ada negara yang memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem sesuai dengan perintah Amerika Serikat.
- c. OKI sebagai kekuatan pendorong bagi negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk melakukannya sesegera mungkin.
- d. Mendesak negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk menilai kembali hubungan tersebut.
- e. Semua negara anggota OKI harus melakukan lebih banyak untuk membantu rakyat Palestina dalam hal bantuan kemanusiaan, pembangunan kapasitas, dan kerjasama ekonomi.
- f. OKI telah menjadi suara terkemuka di forum internasional dan multilateral yang mendukung Palestina, termasuk di dewan Majelis umum PBB.

Diplomasi di Indonesia berhasil mengumpulkan anggota negara-negara OKI lainnya untuk melawan Amerika di PBB. Resolusi Mesir yang menantang pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Muhammad Faqih Hamdani, 2019). Palestina mendapat dukungan internasional. Pada tanggal 21 Desember 2017, Sebanyak 128 negara telah memilih mendukung resolusi mengharuskan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, sementara 9 negara menentang dan 35 negara absain, namun, ada spekulasi bahwa pemungutan suara Majelis Ulama PBB tidak begitu tegang seperti suara DK PBB (https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina).

Kementerian Luar Negeri RI mempresentasikan tanggapan Indonesia atas hasil pertemuan terkait pengakuan Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel bertentangan dengan resolusi ini. Tanggapan Indonesia digambarkan dalam lima poin, yaitu (www.liputan6.com/global/read/3203932 diakses pada 16 Desember 2022):

- a. Indonesia menyambut baik hasil positif dari suara Majelis Umum PBB atas resolusi (di mana Indonesia menjadi co-sponsor) yang mengutuk kebijakan Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

- b. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan mayoritas dunia.
- c. Indonesia berharap semua anggota PBB mengakui pentingnya hasil ini dan mempertimbangkan dukungan moral dan politik dari seluruh dunia untuk negara Palestina dan kemerdekaannya.
- d. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung proses perdamaian antara Palestina dan Israel yang dapat membawa solusi permanen untuk konflik antara kedua negara.
- e. Indonesia melanjutkan perjuangan diplomatiknya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan memberikan bantuan nyata untuk pembangunan negara itu

Diplomasi politik Indonesia dan negara-negara OKI perlu bekerja sama untuk memperkuat diplomasi dalam isu-isu hak asasi manusia. Demi mewujudkan perdamaian di Palestina, implikasi untuk kebijakan luar negeri Indonesia berpotensi positif, karena negara-negara lain akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan berprinsip dalam masa krisis. Namun, upaya untuk menunjukkan keteguhan terhadap negara-negara lain mungkin mundur, efek dari pembalasan dan hukuman terhadap Indonesia melemahkan tekad negara-negara anggota OKI untuk bekerja sama dalam misi pemeliharaan perdamaian di Yerusalem. Ini terutama relevan mengingat bahwa sejumlah negara Timur Tengah telah menyatakan oposisi yang kuat terhadap keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel (Muhammad Faqih Hamdani, 2019).

Hal ini jelas bagi anggota OKI bahwa negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirate Arab sangat lunak terhadap Amerika Serikat. Masalah Palestina telah menjadi larangan terpisah di ketiga negara ini. Di satu sisi, negara ini ingin memperkuat hubungan dengan Israel dalam konfliknya dengan Iran, tetapi di sisi lain, masalah Palestina akan bertindak sebagai hambatan untuk hubungan resmi sampai diselesaikan.

2) Kebijakan Pembebasan Bea Pajak Produk dari Palestina

K.J Holsti berpendapat bahwa tiga metode yang paling umum untuk menerapkan kebijakan luar negeri yaitu kekuatan militer, penguasaan politik, dan kolaborasi ekonomi. Sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam sektor industri pariwisata. Pemerintah Indonesia tidak membatasi impor barang-barang Palestina dalam konteks ini.. William D. Coplin dalam bukunya tentang politik internasional, menjelaskan bahwa ada tiga elemen penting untuk dipertimbangkan ketika menganalisis efek konteks internasional pada politik luar negeri kerjasama di bidang ekonomi telah mengakibatkan kebijakan pembebasan bea pajak Indonesia terhadap barang-barang Palestina. Ini terjadi setelah Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Menteri Ekonomi Nasional Palestina Abeer Odeh menandatangani memorandum pemahaman (MoU) pada tahun 2017. Sebelum perubahan ini, tarif impor sebesar 5 % diterapkan pada semua barang ekspor yang memasuki Indonesia. Namun, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghapus hambatan perdagangan barang-barang Palestina melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Ratifikasi Memorandum kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina mengenai fasilitas perdagangan produk-produk tertentu yang berasal dari wilayah Palestina.

Ekspor pertama Palestina adalah Kurma dan minyak zaitun. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia tidak membatasi impor barang-barang Palestina. Dalam bukunya tentang politik internasional, William D. Coplin, menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu geografis, ekonomi, dan konteks internasional. Karena pemerintah Indonesia telah menerapkan pengeluaran bebas pajak, kebijakan negara-negara lain pasti akan dipengaruhi oleh perkembangan ini di Palestina (William D. Coplin, 1992).

Ekonomi memainkan peranan penting dalam konteks internasional. Perdagangan barang dan jasa, serta aliran modal, membuat beberapa negara bergantung pada negara yang lain. Kebijakan ini telah diterima dengan baik oleh diplomat Palestina di luar negeri, menunjukkan keseriusan dengan mana pemerintah Indonesia mendukung rakyat Palestina. Hal ini juga membantu merangsang ekonomi Palestina, yang telah stagnan karena konflik yang berkepanjangan. Kebijakan negara-negara di luar Indonesia akan dibahas, dengan fokus pembebasan produk Palestina dari pajak ekspor.

3) Dukungan kemanusiaan

Selain bantuan fisik, Indonesia terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina melalui berbagai program bantuan dan sumbangan. Pemerintah Indonesia berusaha membangun kesadaran global akan kondisi sulit yang dihadapi rakyat Palestina dan meminta dukungan dunia dalam upaya bantuan. Ini termasuk bantuan medis, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah Palestina. Indonesia telah menyediakan bantuan medis kepada rakyat Palestina melalui misi medis dan pengiriman peralatan medis. Ini termasuk pengiriman obat-obatan, peralatan medis, dan dukungan dalam merawat korban konflik. Kebijakan dalam bidang pendidikan Indonesia memberikan beasiswa kepada pelajar Palestina untuk melanjutkan pendidikan di universitas-universitas di Indonesia. Ini membantu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Palestina. Kemudian dukungan untuk pengungsi Palestina, Indonesia memberikan dukungan bagi pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara. Dukungan ini mencakup bantuan kemanusiaan dan upaya untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Palestina, seperti membangun rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya guna meningkatkan kualitas hidup penduduk Palestina.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina setelah Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menjadi isu sensitif, namun Indonesia terus berupaya untuk menjaga solidaritas dengan Palestina dan Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah yang timbul di Palestina. Maka disini penulis menarik kesimpulan-kesimpulan berikut tentang kebijakan luar negeri Indonesia mengenai masalah Yerusalem: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia mengenai isu Yerusalem tidak terhindar dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Kedekatan agama dan budaya mendukung Indonesia untuk mendukung Palestina karena negara mayoritas Muslim salah satunya Indonesia. Kedua, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membantu Palestina dan secara aktif berpartisipasi dalam forum internasional untuk melakukannya, sebagai hasilnya Indonesia telah membebaskan barang-barang Palestina dari pembatasan impor. Ketiga, dukungan kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai mediator dan advokat bagi perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

REFERENSI

- [1] Ashari, k (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Dewi Ginting, Elvira. (2013). Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Hukum Internasional, dalam *Jurnal Saintech* Vol. 05 No. 01 Maret.
- [3] Gaza Media. (2022, Desember 13). *Jana, gadis Palestina Tewas dibunuh Pasukan Israel di Atap Rumahnya*.

- [4] Gama, Adettia. (2023). Sikap Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel Dari Tel Aviv Ke Yerusalem di PBB (2014-2019). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* Vol. 6 No. 1.
- [5] Fitriani dan Vido Chandra Panduwinata. (2015). Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- [6] Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: kerangka untuk Analisis*, (ed keempat). Jakarta: Erlangga.
- [7] Holsti, K. J. (1987). *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- [8] Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [9] Irbah, Z. K. (2020). Kebijakan Trump Peace Plan Terhadap Proses Perdamaian Israel dan Palestina Periode 2017-2020. Institutional Repostry UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [10] Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah merangkap Negara Palestina. Indonesia-Palestina.
- [11] Mas'ood, Jack C. Dan Roy Olton. (1999). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- [12] Mohtar, Ms'ood. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- [13] Badry Muntasyir, Muhammad. (2022). Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden dalam Konflik Palestina dan Israel. *PIR Journal* Vol. 7 No. 1 Agustus.
- [14] Satris, Rezki. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sevaia Ibu Kota Israel. *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol. 2 No. 2.
- [15] Sulaeman, D. Y., Sumadinata, R. S., & Mursitama, T. N. (2019). Intertwine Between Technology and Diplomacy: Indonesian E-Diplomacy in Achieving Palestinian Independence. *European Union Digital Library*, 1.
- [16] Sarsito, Totok. (1993). *Politik Internasional*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [17] William D. Coplin. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- [18] Wuryandari, Ganewati. (2011). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] Yani, Yanyan Mochamad. (2007). *Politik Luar Negeri*. Bandung.
- [20] https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina diakses pada 15 Desember 2022
- [21] Mersudi, R. (2018). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jakarta. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/758/pidato/pernyataan-pers-tahunanmenteri-luar-negeri-ri-tahun-2018>.